

SINOPSIS

Masalah-masalah kefakir miskin merupakan masalah yang paling dasar yang menjadi perhatian Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung. Untuk mengurangi peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini, terdapat tiga program bantuan yang di canangkan oleh Dinas Sosial, yaitu program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM), Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dan Pemberdayaan keluarga.

Penelitian ini bersifat analisa kualitatif, penelitian yang menuturkan, mengklarifikasikan, menggambarkan dan menganalisis masalah-masalah yang ada dengan menggunakan teknik tertentu yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimanakah implementasi Program Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung tahun 2006-2010 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Program Penanggulangan PMKS melalui sub program KUBE FM, BLPS, dan Pemberdayaan Keluarga dinyatakan kurang berhasil. Dimana masih terdapat masalah khususnya pada faktor disposisi/ sikap pelaksana dan faktor sumber daya. Banyak terdapat tidak adanya kesesuaian antara aturan kebijakan dengan sikap pelaksana dan juga minimnya sumberdaya, sehingga bantuan tidak mencakup atau menjangkau keseluruhan komunitas PMKS yang ada. Implementasi dari sub program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin dari tahun 2006 - 2010 belum berhasil, Dinas Sosial Kabupaten tidak teliti dalam proses pengarsipan program KUBE FM di antara tahun 2006-2008. Pengawasan dan pendampingan juga kurang maksimal sehingga perlu ditingkatkan sedikit lagi.

Implementasi sub program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial 2009 juga belum berhasil, khususnya pada Faktor disposisi/ sikap pelaksana. Proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping, yang dalam program ini kurang maksimal, dimana pendamping diharuskan memberikan support ilmu dan support mental kepada para penerima BLPS, padahal para pendamping tersebut telah diberikan pelatihan khusus dalam program ini. Pengawasan terhadap aliran dana bantuan juga hendaknya diawasi secara ketat, mulai dari pemberian bantuan hingga konversi bantuan menjadi barang-barang yang dibutuhkan, tidak hanya menyerahkan kepada pendamping saja.

Implementasi program Pemberdayaan Keluarga 2010 juga belum berhasil, khususnya dari faktor sumberdaya. Dari 115 kepala keluarga yang di usulkan, hanya 60 kepala keluarga yang terealisasi mendapatkan bantuan. Bantuan tersebut hanya bersifat temporary saja bagi sebagian penerima bantuan sehingga dibutuhkan tindakan lanjut dari Dinas Sosial dan masyarakat untuk menyikapi masalah tersebut. Aparat pemerintah hendaknya bersifat aktif melihat kebutuhan apa yang seharusnya dipenuhi untuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial dan tidak bersifat pasif hanya memberikan bantuan.